Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahan
Volume 4, Nomor 4, Oktober 2026
e-ISSN: 2963-5225; p-ISSN: 2963-5284, Hal. 409-423
DOI: https://doi.org/10.58192/wawasan.v4i4.5215
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Wawasan

Analisis Pengaruh Investasi, Upah Miinimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik

Tiara Az Zahra Yasmin[1*], Kiky Asmara[2]
[1-2]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
**Penulis Korespondensi: 22011010158@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *Gresik Regency is one of the largest industrial centers in East Java, supported by high investment realization and competitive minimum wage policies. However, this economic growth trend is confronted with the dynamic fluctuations of the Open Unemployment Rate (OUR). This study aims to analyze the effect of investment, Regency Minimum Wage (UMK), and population size on the Open Unemployment Rate in Gresik Regency for the 2011-2025 period. The method used is multiple linear regression analysis with a quantitative approach, utilizing secondary time series data sourced from BPS and BKPM, processed using EViews 12 software. The results indicate that simultaneously, investment, UMK, and population size have a significant effect on the Open Unemployment Rate. Partially, the UMK has a positive and significant effect on the Open Unemployment Rate, indicating that high wage setting creates an excess supply of labor and triggers companies to implement mechanization and efficiency measures to reduce employee cost burdens. Population size has a negative and significant effect due to the high labor absorption in the service sector and local MSME ecosystems. Meanwhile, investment has no significant effect due to the dominance of capital-intensive investments that absorb minimal local labor. The Adjusted R-Squared value of 0.3835 implies that the model can explain 38.35% of the variation in the Open Unemployment Rate in Gresik Regency.*

Keywords: *Investment; Minimum Wage; Open Unemployment Rate; Population; UMK.*

Abstrak. Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur yang didukung oleh tingginya realisasi investasi dan penetapan upah minimum yang kompetitif. Namun, tren pertumbuhan ekonomi tersebut dihadapkan pada fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan jumlah penduduk terhadap TPT di Kabupaten Gresik periode 2011–2025. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data *time series* sekunder yang bersumber dari BPS dan BKPM, yang diolah dengan perangkat lunak *EViews* 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan investasi, UMK, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap TPT. Secara parsial, UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT yang mengindikasikan penetapan upah yang tinggi menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labor*) serta memicu perusahaan melakukan mekanisasi dan efisiensi guna menekan beban biaya pegawai. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan akibat tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa dan ekosistem UMKM lokal. Sementara itu, investasi tidak berpengaruh signifikan karena dominasi investasi padat modal (*capital-intensive*) yang minim menyerap tenaga kerja lokal. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,3835 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 38,35% variasi TPT di Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Investasi; Jumlah Penduduk; Tingkat Pengangguran Terbuka; UMK; Upah Minimum.

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian utama pemerintahan pada seluruh jenjang, baik dari tingkat daerah maupun nasional. Pengangguran adalah kondisi ketika angkatan kerja memiliki keinginan untuk bekerja namun belum memperoleh pekerjaan. Situasi ini dapat terjadi karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan di pasar melebihi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada waktu tertentu (Yuniarti & Imaningsih, 2022). Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya mencerminkan adanya inefisiensi dalam pendayagunaan sumber daya manusia yang tersedia, tetapi juga memberikan dampak yang luas cakupannya dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi

Naskah Masuk: 14 Mei 2026; Revisi: 15 Juni 2026; Diterima: 12 Juli 2026; Tersedia: 21 Juli 2026

masyarakat. Pengangguran di Indonesia sebagian besar berasal dari dua kelompok utama, yakni pengangguran usia muda dan pengangguran terdidik (Rizkia & Haryatiningsih, 2023). Investasi juga berdampak pada jumlah tenaga kerja yang digunakan, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan tingkat investasi akan menyebabkan harga barang dan jasa turut mengalami kenaikan (Hidayah & Seno Aji, 2022). Mengingat dampak yang ditimbulkan cukup luas dan multidimensional, pengurangan angka tingkat pengangguran senantiasa menempati posisi strategis dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang secara konsisten menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan nasional yang penting.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren yang dinamis dan berfluktuasi seiring dengan berbagai perubahan pada kondisi ekonomi domestik dan global. Pada periode tahun 2015, TPT nasional tercatat sebesar 5,81%, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2019 mencapai 5,28%. Akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat (Mifrahi & Darmawan, 2022). Kondisi tersebut berangsur membaik pasca pandemi dan mencapai 4,91% pada Agustus 2024 tingkat terendah dalam satu dekade terakhir. Meskipun tren TPT nasional secara umum menunjukkan perbaikan, dinamika pada Tingkat daerah justru jauh lebih beragam dan kompleks, sehingga data pada skala nasional tidak selalu mencerminkan realitas ketenagakerjaan yang sesungguhnya terjadi pada tingkat skala yang lebih rendah seperti kabupaten/kota. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia tidak selalu bersifat linear dan terus menuntut adanya kajian yang lebih mendalam, terutama pada tingkat daerah yang dimana dinamika ketenagakerjaannya lebih kompleks dan beragam.

Struktur investasi di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2023-2024 didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara konsisten menguasai porsi terbesar dari total realisasi investasi. Pada tahun 2023, PMA mencapai 80,4% dari total investasi, kemudian menurun menjadi 69,13% pada tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 48,6% pada tahun 2025. Sementara itu, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru menunjukkan tren yang bergerak berlawanan arah, yakni dari 19,6% pada tahun 2023 menjadi 30,87% pada tahun 2024, serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 51,4% pada tahun 2025. Sepanjang periode 2023-2025, struktur investasi di Kabupaten Gresik bergeser dari dominasi lmodal asing (PMA) menjadi keunggulan modal dalam negeri (PMDN)

pada tahun 2025. Dibalik keberhasilan pencapaian investasi yang begitu mengesankan tersebut, terdapat sebuah fenomena yang secara empiris sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Selama periode 2011-2025, TPT di seluruh wilayah menunjukkan tren penurunan yang konsisten, termasuk Kabupaten Gresik. TPT Gresik turun bertahap dari 6,82% pada 2023 menjadi 6,45% pada 2024, lalu 5,47% pada 2025. Meskipun terus membaik, pada periode tersebut Gresik menempati urutan kedua TPT tertinggi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa tingkat penganggurannya masih relatif lebih tinggi dibanding sebagian daerah lain. Meskipun seluruh wilayah mengalami perbaikan kondisi ketenagakerjaan, posisi Gresik yang masih relatif tinggi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penciptaan lapangan kerja dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti empiris. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka terjadi akibat banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja bahkan gulung tikar sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait (Firdaus & Sulistyowati, 2021)

Akar permasalahan fenomena tersebut mengarah pada karakteristik dominan investasi yang masuk ke Kabupaten Gresik. Investasi merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu memperluas lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran. Pembangunan infrastruktur seperti pabrik, perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, serta fasilitas ibadah dan wisata turut meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian (Edah & Amelia, 2021). Kenaikan nilai investasi saja tidak serta-merta mampu menurunkan tingkat pengangguran, terutama apabila investasi tersebut tidak difokuskan pada sektor-sektor yang bersifat padat karya (Rahim & Millia, 2025). Hal itu relevan untuk menjelaskan kondisi di Kabupaten Gresik, sebagaimana realisasi investasi menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik (2024) yang mencapai Rp37,9 triliun pada 2024 hanya berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 24.092 orang, rasio serapan yang kecil dibandingkan dengan besaran nilai investasi yang ada. Rendahnya serapan tenaga kerja lokal dari arus investasi besar tersebut bahkan memicu penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, yang secara mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Gresik untuk mempekerjakan minimal 60% tenaga kerja lokal sebuah regulasi yang merupakan bukti nyata bahwa penyerapan tenaga kerja warga Gresik tidak terjadi secara otomatis dan proporsional dari derasnya arus investasi yang ada. Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten/Kotal (UMK) Provinsi Jawa Timur tahun 2025, Kabupaten Gresik menempati posisi tertinggi kedua dengan besaran UMK sebesar Rp4.874.133, hanya berada di bawah Kota Surabaya yang mencatatkan UMK sebesar

Rp4.961.753. Disusul Kabupaten Sidoarjo Rp4.870.511, Kabupaten Pasuruan Rp4.866.890, dan Kabupaten Mojokerto Rp4.856.026. Sejumlah indikator ekonomi yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, upah minimum pekerja (UMP), inflasi, dan faktor-faktor lainnya (Marliana, 2022). Besarnya disparitas UMK tersebut menjadikan Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah tujuan utama bagi angkatan kerja dari berbagai wilayah. Kenaikan upah minimum setiap tahun berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor formal, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap di sektor tersebut cenderung beralih dan bekerja di sektor informal (Baihawafi & Sebayang, 2023). Permasalahan lain adalah ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan atau kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasar kerja. Meskipun permintaan tenaga kerja cukup tinggi, ketimpangan ini tetap dapat mendorong peningkatan angka pengangguran (Adriyanto et al., 2020). Tingginya UMK Gresik di satu sisi menjadikannya sebagai destinasi yang sangat diminati oleh angkatan kerja dari berbagai wilayah sehingga mendorong terjadinya arus migrasi masuk (*in-migration*), sementara di sisi lain berpotensi mendorong pelaku usaha untuk mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan jumlah tenaga kerja atau penerapan otomatisasi dua tekanan berlawanan yang menjadikan UMK sebagai variabel yang relevan untuk diteliti.

Berdasarkan piramida penduduk tersebut komposisi penduduk Kabupaten Gresik tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), terutama pada rentang usia 20-44 tahun yang memiliki jumlah relatif besar baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok usia 20-24 dan 40-44 tercatat sebagai salah satu yang paling tinggi, mencerminkan potensi bonus demografi. Sementara itu, proporsi usia muda (0-14 tahun) juga masih cukup besar, meskipun sedikit lebih kecil dibanding kelompok usia produktif, dan kelompok lansia (65+) relatif lebih kecil sehingga piramida cenderung berbentuk ekspansif menuju stasioner. Komposisi ini menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang melimpah, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasar kerja. Dengan dominasi penduduk usia produktif tersebut, tingkat pengangguran terutama pada usia muda menjadi isu strategis, karena tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap secara optimal dapat berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan dan kondisi empiris yang telah dikemukakan diatas, terdapat urgensi akademis sekaligus urgensi kebijakan yang kuat untuk mengkaji secara kuantitatif pengaruh investasi, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik. Pemilihan rentang waktu 2011-2025 didasari atas pertimbangan bahwa periode tersebut mencakup berbagai dinamika ekonomi yang beragam,

sehingga memberikan variasi data yang memadai untuk menghasilkan estimasi yang representatif dan reliabel. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, serta menjadi masukan berbasis bukti (*evidence-based input*) yang bernilai bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih pro-penyerapan tenaga kerja lokal, kebijakan pengupahan yang berimbang, serta strategi pengelolaan kependudukan yang lebih terpadu.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengangguran

Menurut N. Gregory Mankiw (2013), pengangguran merupakan persoalan makroekonomi yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh setiap lapisan masyarakat dan sebagian besar individu yang kehilangan pekerjaan mengalami tekanan psikologis serta penurunan taraf dan standar kehidupan mereka. Pengangguran menurut Sukirno (2004) merupakan kondisi seseorang yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja dan secara aktif berupaya mencari pekerjaan dengan tingkat imbalan tertentu, namun tidak berhasil mendapatkan posisi yang sesuai dengan yang diharapkannya. Sementara itu, menurut (Apririandi, 2024) Pengangguran merujuk pada penduduk usia kerja (15-65 tahun) yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa putus asa dalam mencari kerja, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha, maupun guna membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam perekonomian (Sukirno, 2004). Investasi merupakan aktivitas penempatan atau penanaman modal pada berbagai sektor ekonomi atau produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Amar & Arkum, 2023). Investasi di suatu daerah perlu terus dikembangkan karena berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Dengan meningkatnya investasi, berbagai kegiatan usaha dan pembangunan dapat tercipta sehingga membuka lapangan pekerjaan baru (Sherty & Mafruhat, 2022). Menurut BPS (2024), realisasi investasi terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Upah Minimum

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja selama periode waktu atau syarat kerja tertentu

(Sukirmo, 2004). Menurut BPS (2024) ,upah atau gaji bersih merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam satu bulan, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dibayarkan oleh perusahaan, instansi, maupun majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai berdasarkan harga setempat, sedangkan upah atau gaji bersih yang dimaksud adalah jumlah yang telah dikurangi berbagai potongan wajib seperti iuran dan pajak penghasilan. Pada pasar tenaga kerja, upah disesuaikan dengan tingkat produktivitas yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang sangat produktif cenderung menerima upah yang tinggi, sebaliknya tenaga kerja yang kurang produktif akan menerima upah yang lebih rendah (Mankiw, 2013).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk secara umum merujuk pada total seluruh individu yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah geografis dalam periode waktu tertentu serta telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan negara (Fitri Yenny & Anwar, 2020). Menurut Sukirno (2004), jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang dapat berperan sebagai pendorong sekaligus penghambat dalam proses pembangunan suatu wilayah atau negara. Pertambahan jumlah penduduk akan menambah ketersediaan tenaga kerja yang berpengaruh pada perluasan pasar, namun di sisi lain, jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menjadi penghambat pembangunan apabila menyebabkan peningkatan angka pengangguran yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

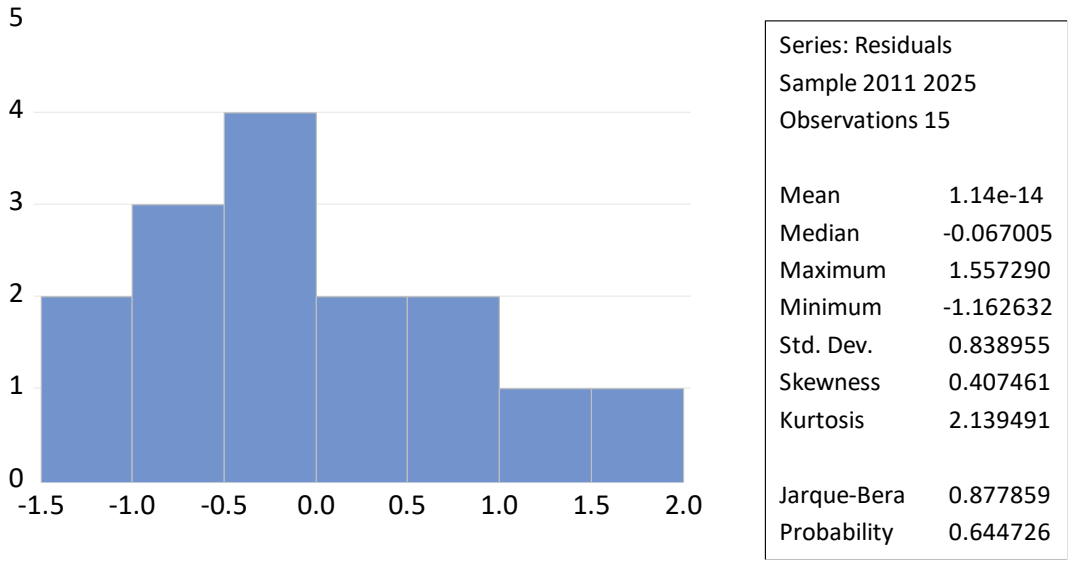
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk *time series* selama periode 2011–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Investasi/BKPM, serta dokumen resmi pemerintah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software EViews 12 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F (simultan), dan uji t

(parsial) dengan tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui kekuatan hubungan serta pengaruh masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Penulis, data diolah.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh nilai probability *Jarque-Bera* sebesar 0,730716. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,730716 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah lmemenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolienaritas

Tabel 1. Uji Multikoleniaritas.

Variable	Centered VIF
INVST	1.901314
UMK	7.382150
JP	7.835273

Sumber: Penulis, data diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, seluruh variabel independen memiliki nilai *Centered VIF* kurang ldari 10. Variabel investasi memiliki nilai VIF sebesar 1,901314, variabel UMK sebesar 7,382150, dan variabel jumlah penduduk sebesar 7,835273. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas**.**

Obs*R-Squared	11.52569	Prob Chi-Square(9)	0.2414

Sumber: Penulis, data diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan White Test, diperoleh nilai Prob. Chi-Square sebesar l0,2414. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi.

Obs*R-Squared	1.383387	Prob Chi-Square(2)	0.5007

Sumber: Penulis, data diolah

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,5007. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (0,5007 > 0,05), sehingga model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.68528	17.66932	3.094928	0.0102
INVST	2.30E-08	2.68E-08	0.856443	0.4100
UMK	1.71E-06	5.48E-07	3.125497	0.0097
JP	-4.26E-05	1.51E-05	-2.824000	0.0165

Sumber: Penulis, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: TPT = 54.68528 + 0,00000000230INVST + 0,00000171UMK - 0,0000425JP. Berdasarkan dari model regresi tersebut, diperoleh interpretasi sebagai berikut: Konstanta (C) sebesar 54.68528. Hal ini berarti bahwa jika variabel Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk bernilai 0 (konstan), maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik adalah sebesar 54,68%. Koefisien regresi variabel Investasi (INVST) adalah sebesar 0,00000000323 bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Investasi sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan), maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan meningkat sebesar 0,00000000230%. Koefisien regresi variabel Upah Minimum (UMK) adalah sebesar 0,00000171 bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika UMK naik sebesar 1 Rupiah (asumsi variabel lain konstan), maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan meningkat 0,00000171%. Koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk (JP) adalah sebesar

0,0000425 bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Jumlah Penduduk bertambah sebanyak 1 jiwa (asumsi variabel lain konstan), maka Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurun sebesar 0,0000425%

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Uji t.

Variable	t-Statistic	Prob.
C	3.094928	0.0102
INVST	0.856443	0.4100
UMK	3.125497	0.0097
JP	-2.824000	0.0165

Sumber: Penulis, data diolah

Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel}. Berdasarkan perhitungan derajat bebas (df) yaitu n - k = 15 - 4 = 11 pada tingkat signifikansi alpha 0,05, diperoleh t_{tabel} sebesar 1,79588.

Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut: Apabila $t_{hitung} < t_{table}$ artinya Ho diterima dan H1 ditolak. Apabila $t_{hitung} > t_{table}$ artinya H0 ditolak dan H1 diterima . Apabila nilai probabilitas *(p-value)* > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila nilai probabilitas *(p-value)* > 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Berdasarkan keterangan diatas, maka berikut hasil uji t setiap variabel: Variabel Investasi (X1). Diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Investasi (INVST) sebesar 0,856. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,796 (0,856 < 1,796). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,4100, yang mana angka tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (0,4100 > 0,05). Artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Investasi tidak memiliki pengaruh yang terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik. Variabel Upah Minimum (X2). Diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Upah Minimum (UMK) sebesar 3,125. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,796 (3,125 > 1,796). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,0097, yang mana angka tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (0,0097 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Upah Minimum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik. Variabel Jumlah Penduduk (X3). Diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Jumlah Penduduk (JP) sebesar -2,824. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,796 (-2,824 > 1,796). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,0165, yang mana angka tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (0,0165 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

secara parsial, variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Uji F.

Keterangan	Nilai
F-Statistic	3.903266
Prob(F-Statistic)	0.040173

Sumber: Penulis, data diolah

Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai F-hitung sebesar 4,522. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai F-tabel yaitu 3,587 (3,903 > 3,587). Selain itu, nilai probabilitas (*p-value*) F-statistic sebesar 0,0401 lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,0401 < 0,05). Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik. Koefisien Determinasi R^2.

Tabel 7. Koefisien Determinasi R^2.

Indikator	Nilai
R-Squared	0.515628
Adjusted R-Squared	0.383526

Sumber: Penulis, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,383526. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan atau kontribusi terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 38,35%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian lini. Pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik 2011–2025

Hasil analisis lmenunjukkan bahwa linvestasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik. Hal lini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa peningkatan investasi seharusnya mampu mendorong perluasan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Ketidaksesuaian ini terjadi karena aliran investasi yang masuk ke Kabupaten Gresik didominasi oleh sektor-sektor berskala besar yang bersifat padat modal (*capital-intensive*), seperti industri petrokimia, semen, baja, dan kawasan industri terpadu. Masuknya modal dalam jumlah masif di sektor-sektor tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan teknologi otomasi, mesin modern, dan infrastruktur fisik, bukan untuk rekrutmen tenaga kerja secara massal (*labor-intensive*). Akibatnya, pertumbuhan

investasi yang tinggi tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Amar & Arkum (2023) menyimpulkan bahwa investasi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengangguran apabila investasi yang masuk lebih banyak terserap oleh sektor-sektor padat modal yang tidak proporsional dalam menciptakan lapangan kerja. Penelitian Apriyono (2021) juga menemukan fenomena serupa dengan struktur industri padat modal, dimana elastisitas penciptaan lapangan kerja terhadap investasi cenderung rendah akibat penggantian tenaga manusia oleh mesin.

Selain faktor mekanisasi industri, alasan lain yang menyebabkan investasi gagal menekan pengangguran lokal adalah fenomena ketidaksesuaian kompetensi (*mismatch skill)*. Perusahaan berskala internasional dengan teknologi tinggi menuntut kualifikasi keahlian yang sangat spesifik dan bersertifikasi. Karena standar tersebut masih sulit dipenuhi oleh mayoritas angkatan kerja lokal, pihak perusahaan cenderung mendatangkan tenaga kerja ahli dari luar daerah. Hal ini menyebabkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022, khususnya Pasal 25 yang mewajibkan setiap perusahaan menyerap minimal 60% tenaga kerja lokal, belum dapat terealisasi secara maksimal di lapangan (Amrizal, 2024). Kesenjangan antara tingginya spesifikasi kebutuhan industri padat modal dengan kapasitas aktual angkatan kerja lokal inilah yang pada akhirnya membuat lonjakan investasi tidak memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Gresik**.** Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik 2011–2025.

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik. Artinya, setiap kali terjadi kenaikan penetapan UMK, tingkat pengangguran di daerah ini justru ikut mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan dan sejalan dengan teori ekonomi ketenagakerjaan neoklasik.

Berdasarkan teori tersebut, penetapan upah di atas titik keseimbangan (*equilibrium wage*) lakan menciptakan kondisi lkelebihan penawaran ltenaga kerja (l*excess supply* l*of labor*). Di satu sisi, tingginya UMK di Gresik memotivasi lebih banyak orang untuk masuk ke pasar kerja, namun di sisi lain, tingginya biaya pegawai memaksa pengusaha untuk membatasi atau mengurangi rekrutmen tenaga kerja. Kesenjangan antara membeludaknya kuantitas pencari kerja dengan terbatasnya lapangan pekerjaan inilah yang bermuara pada tingginya angka pengangguran (Mankiw, 2018). Peningkatan UMK yang terus terjadi setiap tahun sangat berdampak pada dinamika industri di Kabupaten Gresik, mengingat posisinya sebagai salah satu daerah "Ring 1" dengan standar upah tertinggi di Jawa Timur. Beban biaya tenaga kerja

yang mahal mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempercepat proses mekanisasi, yaitu mengganti peran tenaga kerja manusia dengan mesin dan teknologi otomasi (*labor-capital substitution*). Selain memicu mekanisasi di industri besar, tekanan UMK yang tinggi juga memberatkan operasional industri padat karya yang margin keuntungannya terbatas. Hal ini seringkali berujung pada langkah efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga relokasi pabrik ke daerah lain yang standar upahnya lebih terjangkau. Akibatnya, ketersediaan lapangan kerja di Gresik semakin menyusut dan pengangguran meningkat.

Temuan penelitian ini didukung oleh hasil studi Ghinastri & Syafitri (2024) penelitian tersebut secara tegas menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan teradap TPT, di mana semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan maka semakin besar potensi peningkatan pengangguran akibat berkurangnya permintaan tenaga kerja. Senada dengan itu, penelitian Saputri & Yefriza (2025) juga menemukan bahwa upah minimum lberpengaruh positif ldan signifikan lterhadap tingkat pengangguran terbuka. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik 2011–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dan pandangan teori klasik yang menyatakan bahwa lonjakan jumlah penduduk akan menambah beban pencari kerja dan secara otomatis meningkatkan angka pengangguran. Ketidaksesuaian ini terjadi karena pertambahan penduduk di Kabupaten Gresik justru menciptakan efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) yang secara masif mengubah struktur ketenagakerjaan daerah. Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik tidak lagi didominasi oleh sektor manufaktur berskala besar yang porsinya turun menyentuh angka 35,33%. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja kini didominasi oleh sektor jasa yang melesat hingga mencapai 52,47%.

Tren pergeseran ini membuktikan bahwa bertambahnya populasi yang salah satunya didorong oleh masuknya pekerja migran untuk proyek industri strategis secara langsung telah meningkatkan permintaan agregat terhadap barang dan jasa domestik. Ketika angkatan kerja lokal kesulitan menembus sektor industri besar yang padat modal akibat tingginya standar kompetensi, mereka beralih dan terserap ke dalam ekosistem usaha berskala kecil dan menengah yang tumbuh subur melayani kepadatan penduduk tersebut. Fakta ini didukung oleh data tahun 2023 yang mencatat keberadaan 40.198 unit Industri Kecil dan Menengah (IKM) ldi Kabupaten Gresik. Angka ini menempatkan Gresik di peringkat ke-8 terbanyak se-Jawa Timur, dengan kontribusi 4,11% ditingkat provinsi. Secara kumulatif, puluhan ribu unit usaha skala kecil dan menengah tersebut terbukti mampu menyerap hingga 64.127 tenaga kerja.

Temuan ini sejalan dengan teori siklus populasi Ibnu Khaldun (Tungka et al., 2024). Teori tersebut menjelaskan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, maka semakin lbesar pula aktivitas ekonomi yang terbentuk. Jumlah penduduk yang meningkat dapat mendorong spesialisasi pekerjaan, pembagian kerja *(division of labor),* serta peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pada Kabupaten Gresik, pertumbuhan penduduk tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi juga sebagai potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik.

Hasil penelitian lini sejalan ldengan penelitian Malak et al., (2023) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya sektor informal dan perdagangan lokal justru mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian lain oleh Lestari & Nilasari (2025) turut mengonfirmasi fenomena serupa, di mana peningkatan jumlah penduduk tidak selalu menyebabkan naiknya pengangguran selama daerah tersebut memiliki sektor ekonomi (seperti IKM dan jasa) yang dinamis dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gresik tidak lagi bertindak sebagai beban demografi, melainkan bertransformasi menjadi roda penggerak utama ekonomi yang efektif menyerap pengangguran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak *EViews* 12 serta serangkaian pengujian hipotesis terhadap data *time series* Kabupaten Gresik periode 2011–2025, dapat disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi yang cenderung bersifat padat modal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Sementara itu, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT, yang mengindikasikan bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpotensi meningkatkan pengangguran akibat adanya kekakuan upah serta kecenderungan perusahaan menggantikan tenaga kerja dengan teknologi. Di sisi lain, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, yang berarti pertumbuhan penduduk justru dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan permintaan agregat serta berkembangnya sektor informal dan UMKM. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap TPT dan mampu menjelaskan sebesar 38,35% variasi tingkat pengangguran, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah Kabupaten Gresik lebih memprioritaskan

investasi padat karya serta mendorong program kewirausahaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penetapan UMK perlu diselaraskan dengan produktivitas riil serta didukung penguatan sektor UMKM melalui pelatihan dan akses pembiayaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel makroekonomi dan demografi lainnya agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan kerja dan faktor yang mempengaruhi melemahnya. *J*(2)https://doi.org/10.35724/jies.v11i2

Amar, H., & Arkum, D. (2023). Pengaruh investasi terhadap perekonomian, pembangunan manusia, kemiskinan, dan kemiskinan di Kabupaten Bangka. *Publikauma: Jurn*(1). https://doi.org/10.31289/

Amrizal, MF (2024). *Implementasi Pa*. *Penelitian Pendidikan Indo*(1).

Apririandi, Y. (2024). Analisis penyebab peningkatan angka kemiskinan dan penghambatan ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE).*

Apriyono, T. (2021). Pengaruh investasi dan *rasio ketergantungan* terhadap p*Jurnal Kritis, 5* , 81–94.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2024). *Kabupaten Gresik dalam angka 2024* . Badan Pusat Statistik.

Baihawafi, M., & Sebayang, AF (2023). Pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terbuka. https://doi.org/10.29313/jrieb.v%vi%i.1911

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. (2024). *Peta ampuh*

Edah, J., & Amelia, A. (2021). Identifikasi faktor penentu perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Banten. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, 1* (3), 141–15

Firdaus, A., & Sulistyowati, R. (2021). Analisis pengaruh strategi *offline to online* (O2O) terh

Fitri Yenny, N., & Anwar,

Ghinastr, SSW (2024). Pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan terbuka (TPT) dan kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Eco*(1), 1–57https://doi.org/10.1093/os

Malak, M., Kumenaung, W., &

Mankiw, NG (2013). *Makroekonomi* (edisi ke-8). Worth Publishers.

Marliana, L. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan terbuka di Indonesia. *ek*(1), 87. https://doi.org/10.33087

Mifrahi, MN, & Darmawan, AS (2022). Analisis tingkat kemiskinan terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan*, 111–118. https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art11

Rizkia, A., & Haryatiningsih, R. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja kota besar di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* , 125

Saputri, S., & Yefriza. (2025). Pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia (IPM), dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Darma Agung*, *33* (1),

Sherty Veronika, & Mafruhat, AY (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi terhadap kemiskinan terdidik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bi*, 139–146. https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1

Sukirno, S. (2004). *Teori p*(Edisi ke-3). PT

Yuniarti, Q., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan terbuka di Kabupaten Sidoarjo. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *6* (1), 44. htthttps://doi.org/10.33087/ekonomi